



(REVISI)

RENCANA

KERJA

BP2SDM

2024



PENGANTAR

KEPALA BADAN P2SDM

Selama tahun 2024 terdapat perubahan pada alokasi anggaran Badan P2SDM akibat adanya beberapa kebijakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan kinerja khususnya pada target kegiatan di lingkup Badan P2SDM Tahun 2024.

Penerbitan dokumen Suplemen Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2024 disusun dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan P2SDM. Penyesuaian pada dokumen Suplemen Rencana Kerja dilakukan selain pada alokasi anggaran, namun juga pada target kegiatan yang dilaksanakan.

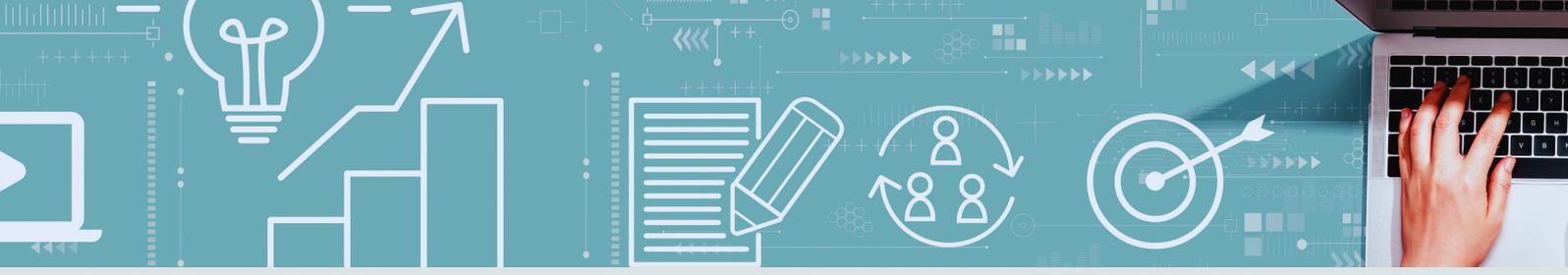
Suplemen Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2024 merupakan perbaikan penjabaran rencana pelaksanaan kinerja Badan P2SDM Tahun 2024. Melalui dokumen ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan lingkup Badan P2SDM ke depannya dapat dilakukan secara lebih efektif.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita semua untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka meningkatkan kinerja dan kapasitas organisasi Badan P2SDM pada saat ini dan di masa yang akan datang.

Jakarta, 12 Desember 2024

Kepala Badan P2SDM,

PALGUNA RUTEKA
NIP. 19650924 199303 1 001



Pengantar (1)

Daftar Isi (2)

I Ikhtisar (3)

**II Highlight Kinerja Badan
P2SDM Tahun 2024 (4)**

**III Perubahan Pagu Badan
P2SDM Tahun 2024 (5)**

**IV Perubahan Kinerja Badan
P2SDM Tahun 2024 (8)**

Penutup (12)

DAFTAR ISI

I. IKHTISAR

Selama pelaksanaan tahun 2024, terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi target kinerja diantaranya penyesuaian pagu, dan adanya anggaran yang terkena blokir *automatic adjustment* (AA). Kebijakan ini mengakibatkan terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan mempengaruhi target kinerja Badan P2SDM. Selain itu, satuan kerja di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga menjalin kerjasama dengan berbagai mitra sehingga terdapat perubahan target kinerja. Selain itu, berdasarkan surat edaran Sekretaris Jenderal KLHK nomor SE.14/SETJEN/ROCAN/REN.2/11/2024 poin 2a terkait perjanjian kinerja, terdapat arahan terkait penyesuaian target kinerja dengan melakukan rasionalisasi sesuai anggaran riil yang tersedia. Selain itu terdapat arahan penyesuaian pada target kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dengan nilai maksimal 82,5 poin. Oleh karena itu dilakukan penyesuaian pada target kinerja Badan P2SDM Tahun 2024.

Pagu Badan P2SDM yang semula Rp377.617.591.000,- berubah menjadi Rp380.261.239.000,- pada akhir tahun 2024. Adapun dalam alokasi anggaran tersebut juga masih terdapat pagu blokir sebesar Rp15.107.251.000,-. Selain perubahan pagu, juga terdapat penambahan Rincian Output (RO) berupa RO generik "Layanan BMN" pada setiap satker di lingkup Badan P2SDM. RO ini merupakan salah satu RO yang masuk ke dalam RO SBKU yang dapat meningkatkan nilai capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di lingkup Badan P2SDM.

Perubahan pagu Badan P2SDM yang terjadi selama 2024 disebabkan karena terdapat penambahan pagu yang berasal dari luncheon sisa pagu anggaran SBSN sebesar Rp2.132.446.000,-; Optimalisasi belanja internal berupa pergeseran antar jenis belanja dan antar program dalam Eselon I yang sama untuk memenuhi sebagian kekurangan belanja pegawai sebesar Rp10.209.482.000,-; Penambahan pagu dari pergeseran antar Eselon I dalam satu program yang sama lingkup KLHK sebesar Rp953.280.000,- untuk memenuhi kekurangan Biaya Operasional Penyuluh (BOP); Optimalisasi belanja internal untuk pemenuhan belanja pegawai tahap kedua dengan melakukan pergeseran antar jenis belanja dan antar program dalam Eselon I yang sama sebesar Rp2.662.541.000,-; Selain itu dilakukan penambahan RO Layanan BMN pada seluruh Satker lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp35.100.000,-; Pergeseran anggaran antar Eselon I sebesar Rp821.579.000,- untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai Eselon I lainnya di lingkup KLHK; Revisi terakhir adalah penyesuaian kebutuhan belanja pegawai di lingkup Badan P2SDM Tahun 2024 akibat adanya perhitungan Penyesuaian PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada aplikasi Gaji Web berupa pergeseran belanja pegawai antar Eselon I KLHK sebesar Rp379.501.000,-.

II. HIGHLIGHT KINERJA BADAN P2SDM TAHUN 2024 (REVISI)

Highlight Indikator Kinerja BP2SDM

15.536 Orang

Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya

0,5 Triliun

Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan

491 Orang

Jumlah lulusan SMK kehutanan yang kompeten dan bersertifikat

80 Poin

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BP2SDM

70 Poin

Indeks efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan

82,5 Poin

Nilai Kinerja Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.368 Lembaga

Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup



III. Perubahan Pagu Badan P2SDM TA 2024

Alokasi anggaran BP2SDM pada Tahun 2024 beberapa kali mengalami penyesuaian akibat adanya berbagai kebijakan. Pada awal Tahun 2024 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memperoleh anggaran sebesar Rp377.617.591.000,- untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia. Pada akhir periode 2024 penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM tahun didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp380.261.239.000,-.

Selama pelaksanaan tahun berjalan, kebijakan dalam hal penganggaran yang menyebabkan adanya pergeseran dan perubahan pagu BP2SDM yaitu: Pada Januari 2024, terdapat arahan pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) sebesar Rp14.650.016.000,00. Kebijakan ini juga mengakibatkan terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Pada maret 2024, terdapat penambahan pagu yang berasal dari luncheon sisa pagu anggaran SBSN sebesar Rp2.132.446.000,- sehingga pada tanggal 31 Maret 2024 dilakukan revisi kedua yang mengakibatkan peningkatan pagu anggaran menjadi Rp379.750.037.00,-.

Sehubungan dengan terdapat peningkatan kebutuhan belanja pegawai akibat terbitnya Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan KLHK maka pada tanggal 2 Juli 2024 dilakukan revisi DJA ketiga dengan melakukan optimalisasi belanja internal berupa pergeseran antar jenis belanja dan antar program dalam Eselon I yang sama untuk memenuhi sebagian kekurangan belanja pegawai sebesar Rp10.209.482.000,-. Revisi DJA keempat dilakukan pada tanggal 31 Juli 2024 penambahan pagu dari pergeseran antar Eselon I dalam satu program yang sama lingkup KLHK sebesar Rp953.280.000,00 guna memenuhi kekurangan Biaya Operasional Penyuluh (BOP). Penambahan tersebut mengakibatkan perubahan pagu Badan P2SDM menjadi Rp380.703.317.000,-.

Selanjutnya, pada Bulan Oktober, Badan P2SDM dihimbau untuk melakukan optimalisasi belanja internal kembali untuk pemenuhan belanja pegawai tahap kedua, sehingga dilakukan Revisi DJA kelima berupa pergeseran antar jenis belanja dan antar program dalam Eselon I yang sama sebesar Rp2.662.541.000,-. Selain revisi belanja pegawai tersebut, pada Revisi DJA kelima ini dilakukan pergeseran antar Rincian Output (RO) dalam satuan kerja yang sama untuk penambahan RO Layanan BMN pada seluruh Satker lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp35.100.000,-. Hal ini merupakan strategi Badan P2SDM untuk dapat mencapai Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) yang baik mengingat adanya perubahan tata cara perhitungan yang membutuhkan penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK).

Pada bulan Oktober 2024 terdapat pergeseran anggaran antar Eselon I sebesar Rp821.579.000,- untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai Eselon I lainnya di lingkup KLHK sehingga mengakibatkan penurunan pagu Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi Rp379.881.738.000,-. Pada Desember 2024, berdasarkan perhitungan Penyesuaian PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada aplikasi Gaji Web terdapat penyesuaian kebutuhan belanja pegawai di lingkup Badan P2SDM Tahun 2024 sehingga terdapat selisih kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp379.501.000,-. Untuk itu dilakukan revisi DJA ketujuh pada tanggal 12 Desember 2024 berupa pergeseran antar Eselon I lingkup KLHK yang mengakibatkan penambahan pagu anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi Rp380.261.239.000,00.

Pagu akhir Badan P2SDM tersebut terbagi dalam 3 Program dengan rincian:

1. Program Dukungan Manajemen Rp192.371.234.000,-
2. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Rp5.323.607.000,-
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp187.890.005.000,-

Pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi tersebut termasuk di dalamnya alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp128.405.606.000,-. Selain itu di dalam anggaran pendidikan tersebut juga terdapat alokasi untuk proyek pendanaan SBSN sebesar Rp52.405.606.000,-. Alokasi anggaran Badan P2SDM per jenis belanja terbagi atas belanja pegawai sebesar Rp125.844.302.000,-; belanja barang Rp184.154.865.000,- dan belanja modal sebesar Rp70.262.072.000,-. Alokasi anggaran Badan P2SDM per sumber dana yaitu RM sebesar Rp267.694.378.000,-; PNBPN sebesar Rp60.161.255.000,-; dan dana SBSN sebesar Rp52.405.606.000,-.

PAGU BADAN P2SDM 2024

Rp380.261.239.000,-

PAGU PER JENIS BELANJA

Rp125.844.304.000,-

 **Belanja Pegawai**

Rp184.154.865.000,-

 **Belanja Barang**

Rp70.262.072.000,-

 **Belanja Modal**

PAGU PER SUMBER DANA

Rp267.694.378.000,-
Rupiah Murni (RM)

Rp60.161.255.000,-
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Rp52.405.606.000,-
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)



PAGU PER PROGRAM

Rp192.371.234.000,-
Program Dukungan Manajemen

Rp5.323.607.000,-
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Rp187.890.005.000,-
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Berdasarkan alokasi pagu pada akhir tahun anggaran tersebut, distribusi alokasi anggaran per satuan kerja lingkup Badan P2SDM Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

No	Satker	Pagu	Blokir
1	Kantor Pusat BP2SDM	56.818.311.000	2.138.399.000
2	Pusat Diklat SDM LHK	41.517.369.000	1.485.200.000
3	Pusat PGLHK	17.752.604.000	412.392.000
4	BPLHK Bogor	14.801.527.000	212.655.000
5	BPLHK Pematangsiantar	13.397.884.000	210.083.000
6	BPLHK Samarinda	12.733.828.000	214.311.000
7	BPLHK Makassar	14.277.062.000	219.133.000
8	BPLHK Pekanbaru	14.384.704.000	187.279.000
9	BPLHK Kadipaten	15.829.434.000	216.408.000
10	BPLHK Kupang	13.521.694.000	205.416.000
11	SMKKN Manokwari	71.529.371.000	1.082.926.000
12	SMKKN Kadipaten	23.988.877.000	2.129.687.000
13	SMKKN Makassar	22.667.320.000	2.130.430.000
14	SMKKN Samarinda	22.505.895.000	2.130.442.000
15	SMKKN Pekanbaru	24.535.359.000	2.132.490.000
Badan P2SDM		380.261.239.000	15.107.251.000

IV. PERUBAHAN KINERJA BADAN P2SDM TAHUN 2024

Pada Tahun 2024, Badan P2SDM mendukung 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran Program) / Indikator Kinerja Program KLHK melalui 7 (tujuh) Indikator Kinerja Badan P2SDM. Prioritas anggaran BP2SDM pada tahun 2024 adalah untuk Anggaran pendidikan; mempercepat penyelesaian capaian atau meminimalkan gap capaian target kegiatan Renstra Badan P2SDM melalui pelatihan vokasi tenaga teknis yang berorientasi industri dan wirausaha dan Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan; serta memprioritaskan alokasi anggaran yang mendukung Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional / PN) seperti peningkatan kapasitas KTH serta penyuluh dan/atau pendamping. Hal ini menjadi salah satu alasan terdapat RO yang memiliki target yang meningkat secara signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2023.

Selama pelaksanaan tahun 2024, terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi target kinerja diantaranya penyesuaian pagu, dan adanya anggaran yang terkena blokir *automatic adjustment* (AA). Selain itu, satuan kerja di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga menjalin kerjasama dengan berbagai mitra. Berdasarkan surat edaran Sekretaris Jenderal KLHK nomor SE.14/Setjen/Rocan/Ren.2/11/2024 poin 2a terkait perjanjian kinerja, terdapat arahan terkait penyesuaian target kinerja dengan melakukan rasionalisasi sesuai anggaran riil yang tersedia. Selain itu terdapat arahan penyesuaian pada target kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dengan nilai maksimal 82,5 poin. Oleh karena itu dilakukan penyesuaian pada target kinerja Badan P2SDM Tahun 2024. Adapun rincian target dan capaian kinerja BP2SDM Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut



INDIKATOR KINERJA BP2SDM TAHUN 2024

<i>Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran Program) / Indikator Kinerja Program KLHK</i>	<i>Sasaran BP2SDM</i>	<i>Indikator Kinerja BP2SDM*</i>	<i>Target Awal</i>	<i>Target Akhir</i>	<i>Capaian 2024</i>
T2.S2.1 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	T2.S2.1.4 Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	T2.S2.1.4.1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (0,5 Triliun Rupiah)	0,5 Triliun Rupiah	0,5 Triliun Rupiah	1,43 Triliun Rupiah
T4.S1.1 Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	T4.S1.1.1 Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S1.1.1.1 Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya	14.915 Orang	15.536 Orang	15.738 Orang
		T4.S1.1.1.2 Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	491 Orang	491 Orang	487 Orang
		T4.S1.1.1.3 Indeks efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	70 Poin	70 Poin	75,26 Poin
		T4.S1.1.1.4 Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup	3.368 Unit	3.368 Unit	3.368 Unit
T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	80 Poin	80 Poin	87,77 Poin
		T4.S2.1.1.2 Nilai Kinerja Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	97,25 Poin	82,5 Poin	98,91 Poin

* Keterangan Indikator Kinerja BP2SDM:

- Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya dihitung berdasarkan RO Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM; Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan; Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan; serta Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha.
- Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan dihitung melalui penilaian pengelolaan KHDTK.
- Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dihitung berdasarkan RO Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan; serta Lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan.

Indikator kinerja BP2SDM di atas kemudian dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) serta didetailkan melalui klasifikasi rincian output (KRO) dan rincian output (RO) yang sudah ditetapkan. IKK, KRO dan RO Badan P2SDM telah disusun secara relevan untuk mendukung keberhasilan tercapainya setiap kegiatan dan sasaran. Secara lebih terperinci target dan capaian terbaru pada IKK, KRO dan RO Badan P2SDM sebagaimana Tabel berikut.

TABEL 1. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN RINCIAN OUTPUT (RO) BADAN P2SDM

<i>Kegiatan / Sasaran Kegiatan</i>	<i>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)</i>	<i>Capaian 2024</i>	<i>Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO)</i>	<i>Capaian 2024</i>
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI				
Kegiatan: 6745- Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK				
<i>T4.S1.1.1.1.1 Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan</i>	T4.S1.1.1.1.1.1 Lulusan Diklat Aparatur LHK (3.659 orang)	3.659 Orang	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan (3.659 Orang)	3.659 Orang
	T4.S1.1.1.1.1.2 Lulusan Diklat Non Aparatur LHK (2.506 orang)	2.507 Orang	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan (2.506 Orang)	2.507 Orang
	T4.S1.1.1.1.1.3 Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha (7.871 orang)	7.871 Orang	Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha (7.871 Orang)	7.871 Orang
	T4.S1.1.1.1.1.4 Lulus Pendidikan Karya Siswa (10 orang)	11 Orang	Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK (10 Orang)	11 Orang
	<i>T4.S1.1.1.3.1 Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan</i>	T4.S1.1.1.1.3.1 Nilai KHDTK yang Dikelola (70 Poin)	75,26 Poin	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat (7 Unit)
Layanan Pengelolaan KHDTK (1 Layanan)				1 Layanan
6746-Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan				
<i>T4.S1.1.1.2.1 Tersedianya Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat</i>	T4.S1.1.1.2.1.1 Jumlah Lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat (491 Orang)	487 Orang	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat (491 Orang)	487 Orang
			Layanan Pembinaan SMK Kehutanan (1 Layanan)	1 Layanan
			Pengadaan Peralatan Sekolah (5 Paket)	5 Paket
			Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN) (1 Unit)	1 Unit
			Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah (4 Unit)	4 Unit
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (RM) (1 Unit)	1 Unit
6747-Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
<i>T4.S1.1.1.4.1 Terwujudnya Gerakan Peduli dan/atau berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan</i>	T4.S1.1.1.4.1.1 Jumlah Satuan Pendidikan dan Lembaga Masyarakat dan Komunitas Peduli dan/atau berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan (3.368 Lembaga)	3.368 Lembaga	Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan (3.350 Lembaga)	3.350 Lembaga
			Lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan (18 Lembaga)	18 Lembaga
<i>T4.S1.1.1.4.2 Terbentuknya SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan</i>	T4.S1.1.1.4.2.1 Jumlah SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Lembaga Masyarakat dan Komunitas (720 Orang)	720 Orang	SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan (720 Orang)	720 Orang

<i>Kegiatan / Sasaran Kegiatan</i>	<i>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)</i>	<i>Capaian 2024</i>	<i>Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO)</i>	<i>Capaian 2024</i>
6748- Perencanaan dan Pengembangan SDM				
<i>T4.S1.1.1.1.2 Tersedianya Rencana dan Instrumen Pengembangan LHK</i>	<i>T4.S1.1.1.1.2.1 Jumlah SDM LHK Bersertifikat Kompetensi (1.500 Orang)</i>	1.677 Orang	Layanan Sertifikasi dan uji kompetensi SDM LHK (1.500 orang)	1.677 Orang
	<i>T4.S1.1.1.1.2.2 Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK (5 Jenis Jabatan)</i>	5 Jenis Jabatan	Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK (5 Dokumen)	5 Dokumen
	<i>T4.S1.1.1.1.2.3 Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK (5 Jenis Jabatan)</i>	5 Jenis Jabatan	Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK (5 Dokumen)	5 Dokumen
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN				
5444-Peningkatan Penyuluhan				
<i>T2.S2.1.4.1.1 Meningkatnya kemandirian kelembagaan kelompok masyarakat</i>	<i>T2.S2.1.4.1.1.1 Jumlah KTH (KTH Mandiri) (100 Unit)</i>	100 Unit	KTH Mandiri (100 Kelompok Masyarakat)	100 Kelompok Masyarakat
	<i>T2.S2.1.4.1.1.2 Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang dibentuk dan dikembangkan (50 Unit)</i>	50 Unit	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) (50 Kelompok Masyarakat)	50 Kelompok Masyarakat
<i>T2.S2.1.4.1.2 Meningkatnya kapasitas Penyuluh</i>	<i>T2.S2.1.4.1.2.1 Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh handal) (4.500 Orang)</i>	4.500 Orang	Kapasitas penyuluh dan/atau pendamping yang handal (4.500 Orang)	4.500 Orang
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
5439-Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BP2SDM				
<i>T4.S2.1.1.1.7 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</i>	<i>T4.S2.1.1.1.7.1 Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (80 Poin)</i>	87,77 Poin	Layanan Umum (12 Layanan)	12 Layanan
	<i>T4.S2.1.1.1.7.2 Level Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (Level 4)</i>	Level 3 (3,82 Poin)	Layanan Sarana Internal (11 Paket)	11 Paket
	<i>T4.S2.1.1.1.7.3 Laporan keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang tertib dan akuntabel (1 Dokumen)</i>	1 Dokumen	Layanan Prasarana Internal (3 Paket)	3 Paket
	<i>T4.S2.1.1.1.7.4 Nilai Kinerja Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (82,5 Poin)</i>	98,91 Poin	Layanan Perkantoran (15 Layanan)	15 Layanan

V. PENUTUP

Dokumen Revisi Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2024 ini disusun untuk menggambarkan penyesuaian target kinerja dan anggaran akibat adanya beberapa kebijakan berupa penyesuaian pagu untuk pemenuhan tambahan kegiatan serta pelaksanaan kerjasama dengan berbagai stakeholder. Melalui penyesuaian yang dilakukan tersebut, diharapkan setiap satuan kerja BP2SDM tetap berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien guna mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Dokumen ini disusun sebagai tambahan acuan dan penyempurnaan dokumen Rencana Kerja sebelumnya bagi setiap Satker di lingkup Badan P2SDM dalam melaksanakan kegiatan selama Tahun berjalan. Dengan terbitnya dokumen suplemen ini, dokumen Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2024 tetap menjadi acuan setiap satker dalam melaksanakan kegiatan, sedangkan perubahan yang terjadi mengacu pada dokumen ini.

Selain dukungan anggaran, dalam pelaksanaannya, seluruh elemen pelaksana program dan kegiatan Badan P2SDM diharapkan dapat bekerjasama secara optimal, efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan ketertiban dan ketaatan aturan teknis dan administrasi sehingga upaya-upaya dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dirasakan dan dipertanggungjawabkan.



2024



Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

